

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RIZKY RAHMADANI**

**NBI : 1311900213**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RIZKY RAHMADANI**

**NBI : 1311900213**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

**SKRIPSI**

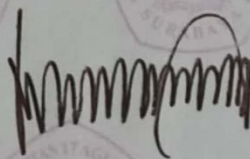
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**RIZKY RAHMADANI**

**NBI : 1311900213**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Hufren, S.H., M.H**

**NPP/NIP : 20310130613**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

Oleh:

**RIZKY RAHMADANI**

**NIM: 1311900213**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 27 Juni 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/FH/VI/2023**

**Tanggal : 06 Juni 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

**: Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H.**  
**NPP: 203102108845**

**Sekretaris**

**: H.R. Adianto Mardjiono, S.H.,M.Si.**  
**NPP: 20310930349**

**Anggota**

**: Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.**  
**NPP: 20310160711**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H., CMC**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Rahmadani

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *UNIGHA : Journal Of Jabal Ghafur University* dengan judul

### **“HAK IMUNITAS DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT DI HADAPAN HUKUM”**

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 28 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rizky Rahmadani

NBI: 1311900213

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Rahmadani

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di *UNIGHA : Journal Of Jabal Ghafur University* dengan judul “**Hak Imunitas Dalam Perspektif Prinsip Persamaan Derajat di Hadapan Hukum**”. Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rizky Rahmadani

NBI: 1311900213

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Rahmadani

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa ‘Skripsi’ yang saya buat yang berjudul:

**“HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM”**. Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan ‘Duplikasi’ dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 2 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Rizky Rahmadani  
NBI. 1311900213

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Rahmadani

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
**“HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM”**.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Rizky Rahmadani  
NBI: 1311900213



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk setiap kalangan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan masukan ataupun kritik bilamana terjadi kesalahan demi kesempurnaan dalam penulisan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap nikmat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan rezekinya berupa kesehatan dan kelancaran kepada Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan judul **“HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM”** dengan lancar. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun begitu, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai tepat waktu tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, Penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
3. Dr. Hufron, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen mata kuliah MPH yang telah memberikan arahan dalam menemukan judul skripsi.
5. Agus Suroso dan Srijati selaku kedua orang tua Penulis yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada Penulis.
6. Astrid Ananda S,Pd. selaku kakak penulis yang memberi semangat dan membiayai penulis selama Kuliah.
7. Khrisna Mulya S.H. dan Bunga Andjani S.H., selaku sahabat penulis yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
8. Ariana Milanda, Rizal Anzalil, Bilqis Salma, Princes Elsa, Abdullah Jadid Axel Pramudya, dan Nadila selaku sahabat Penulis yang memberi dukungan kepada Penulis.
9. Diovan Ady, selaku sahabat penulis yang memberikan motivasi dan saran kepada penulis
10. Jennifer Laura, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan bantuan selama proses perkuliahan berlangsung.

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya, terutama dalam hal kebebasan berbicara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan (*separation of power*) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dalam bidang legislatif. DPR dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibekali dengan sebuah instrumen kekebalan (hak Imunitas). Hak Imunitas telah termaktub dalam Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD (MD3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hak imunitas dalam perspektif negara hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jika dikaji dalam perspektif negara hukum yang tidak hanya terbatas pada Undang-Undang, Hak Imunitas diberikan dalam rangka melindungi sikap, tindakan, dan pendapat anggota DPR RI agar tidak mudah dikriminalisasi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh negara meskipun terkadang hak imunitas digunakan sebagai tameng oleh anggota DPR RI bilamana terjadi gugatan hukum. Selain itu muncul permasalahan baru dalam Pasal 245 ayat 1 UU No.2 tahun 2018 tentang MD3 yang dianggap sebagai konsepsi perluasan hak imunitas bagi anggota DPR. Anggota DPR dianggap berlindung dibalik kewenangan lembaga etiknya yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Hak Imunitas, Negara Hukum

## ABSTRACT

*Indonesia is a constitutional state that adheres to a democratic system and has the responsibility to guarantee protection for every citizen, especially in terms of freedom of speech as stated in Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution. Indonesia adheres to the principle of separation of power placing the People's Representative Council as the highest state institution in the legislative field. The DPR in carrying out its duties and obligations is provided with an instrument of immunity (right of immunity). The right to immunity is contained in Article 20 A paragraph 3 of the 1945 Constitution and Law Number 2 of 2018 concerning the MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). This study aims to determine and explain the position of the right of immunity in the perspective of a rule of law. The approach method used is the statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach). If examined in the perspective of a rule of law that is not only limited to laws, the right to immunity is given in order to protect the attitudes, actions and opinions of members of the DPR RI so that they are not easily criminalized in carrying out tasks assigned by the state although sometimes the right of immunity is used as a shield by members of the DPR RI in the event of a lawsuit. Apart from that, a new problem has emerged in Article 245 paragraph 1 of Law No. 2 of 2018 concerning MD3 which is considered a conception of expanding immunity rights for members of the DPR. Members of the DPR are considered to have taken refuge behind the authority of their ethical institution, namely the Honorary Council of the Council.*

*Keywords: House of Representatives, Immunity Rights, Rule of Law*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....   | ii   |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....   | iii  |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....                                      | iv   |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....                                      | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS..... | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | vii  |
| KATA PENGANTAR .....   | viii |
| ABSTRAK .....  | ix   |
| ABSTRACT.....  | x    |
| DAFTAR ISI.....  | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 5    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 6    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 6    |
| 1.5 Metode Penelitian.....   | 6    |
| 1.5.1. Jenis Penelitian.....   | 6    |
| 1.5.2. Metode Pendekatan .....   | 7    |
| 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....   | 7    |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                      | 8    |
| 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....   | 8    |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....  | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 10   |
| 2.1 Konsep Negara Hukum .....  | 11   |
| 2.2 Negara Demokrasi.....  | 15   |

|                                 |  |           |
|---------------------------------|--|-----------|
| 2.3                             | Pengertian Kesamaan di Depan Hukum.....  | 18        |
| 2.4                             | Konsep Hak Imunitas .....  | 22        |
| 2.5                             | Dewan Perwakilan Rakyat.....   | 25        |
| 2.5.1.                          | Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.....  | 27        |
| 2.5.2.                          | Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat.....   | 28        |
| 2.5.3.                          | Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat .....   | 30        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b> |  | <b>31</b> |
| 3.1.                            | Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Negara Hukum.....  | 31        |
| 3.1.1.                          | Kedudukan Hak Imunitas Anggota DPR Terhadap Prinsip Persamaan di<br>Hadapan Hukum<br>.....                               | 45        |
| 3.1.2.                          | Perbandingan Hak Imunitas Anggota DPR RI dengan Hak Imunitas<br>Parlemen Amerika<br>.....                                | 52        |
| 3.1.3.                          | Batasan Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR.....  | 55        |
| 3.2.                            | Kedudukan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Setelah Terbitnya<br>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 ..... | 58        |
| 3.2.1.                          | Kewenangan Izin Pemeriksaan Anggota DPR Oleh Presiden.....   | 63        |
| 3.2.2.                          | Kewenangan MKD dalam Proses Pemeriksaan Anggota DPR RI .....   | 70        |
| 3.2.3.                          | Perbandingan Keanggotaan MKD dengan Dewan Etik di Lembaga<br>Lainnya 75  |           |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>      |  | <b>80</b> |
| 4.1.                            | Simpulan.....  | 81        |
| 4.2.                            | Saran.....   | 81        |
| <b>DAFTAR BACAAN .....</b>      |  | <b>83</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3.1.1 Penerapan Hak Imunitas di 2 (dua) Lembaga di Indonesia .....                       | 50 |
| Tabel 3.2.1 Perubahan Frasa Pasal 245 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2014 dan UU No.2 Tahun 2018..... | 62 |
| Tabel 3.2.2 Tentang Izin Presiden Terhadap Pemeriksaan Pejabat Negara .....                    | 69 |
| Tabel 3.2.3 Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....                            | 80 |
| Tabel 3.2.4 Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....                             | 80 |